

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Busroh, Abu Daud, 1990, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Gunawan, Aditya Batara, Anak Agung Banyu Perwita, Andi Widjadjanto, Begi Hersutanto, Cecep Darmawan, Iman Soleh, Ludiro Madu, Mahi M.H., Muradi, Teuku Rezasyah, 2013, *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*, Bandung

Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang

Hanjito, Ronny, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung

Huda, Ni'matul, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII, Yogyakarta

Jeddawi, Murtir, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah – Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian dan Peraturan Daerah*, Kreasi Total Media, Yogyakarta

Kaho, Josef Riwu, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lubis, M. Solli, 1974, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung

- Manan, Bagir, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNISKA. Jakarta
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Bakti, Bandung
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta
- Santoso, Agus, 2002 *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Silalahi, M. Daud, 1992, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*, Sinar Harapan, Jakarta`
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Syamdufin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syaukani,Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wibowo, Gatot Dwi Hendro, 2009, *Hukum Konservasi Lautan: Kerangka Hukum Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang untuk Keanekaragaman Hayati Lautan*, Cakrawala Printing and Advertising, Sidoarjo

Widjaja, H.A.W., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wignosubroto, Soetandyo, 2005, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development Yayasan Tifa, Jakarta

Yudoyono, Bambang, 2002, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparat Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

## B. SKRIPSI/THESIS

Puspitasari, Maygy Dwi, “Perlindungan Hukum Cagar Budaya Bawah Air Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional”. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, *Skripsi*, 2014

Waluyo, Tugas Agus Priyo, “Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, *Tesis*, 2015

## C. INTERNET

Adhityatama, Shinatoria, “Makalah Survey Awal di Situs Peninggalan Perang Dunia Ke-2 Kapal Karam HMAS Perth, Pulau Panjang, Provinsi Banten”, Pusat Arkeologi Nasional, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/304569161> pada 20 Maret 2019

Ariyanti, Fitri, “Bangkai Kapal Perang Dijarah Oknum, Australia dan AS Protes RI”, *Liputan 6*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3242647/bangkai-kapal-perang-dijarah-oknum-australia-dan-as-protes-ri> pada 21 Maret 2018

Asril, Sabrina, “Penjarahan Kapal Perang Sisa PD II di Banten Terus Terjadi”, *Kompas*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/08/17153751/penjarahan.kapal.perang.sisa.pd.ii.di.banten.terus.terjadi>. pada 8 Juli 2018

IKAHAN (Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia Australia), “Pertempuran Selat Sunda: Perlawanan HMAS Perth.”, *IKAHAN*, diakses dari <http://ikahan.com/2014/01/pertempuran-selat-sunda-bantuan-hmas-perth-1-untuk-pertahanan-indonesia/> pada 13 April 2018

Sanley, Peter, “Remembering 1942: The Loss of HMAS Perth”, *Australian War Memorial*, diakses dari <https://www.awm.gov.au/articles/blog/1942-hmas-perth>, pada 21 Maret 2018

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 84)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2)

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1165)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2016  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis  
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1474)

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan  
Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2018  
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona  
Inti Pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir Dan  
Pulau-Pulau Kecil Untuk Eksploitasi (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 117)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan  
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran  
Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016)

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang  
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan  
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi  
Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor  
83)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2018  
tentang Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth di  
Perairan Provinsi Banten

## **G. LAIN-LAIN**

Transkrip wawancara dengan Ibu Iim Naimah, S.Pi., M.S.E.,  
Kepala Subdirektorat Pengawasan Konservasi Perairan,  
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan  
dan Perikanan Pada Tanggal 8 Oktober 2018, Pukul 08.00  
WIB di Kementerian Kelautan dan Perikanan